

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA TEBING TINGGI MENURUT LAPANGAN USAHA

2014-2018



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA TEBING TINGGI MENURUT LAPANGAN USAHA

2014-2018



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA TEBING TINGGI
MENURUT LAPANGAN USAHA 2014-2018**

ISSN : 2655-1233
Nomor Publikasi : 12740.1803
Katalog BPS : 9302021.1274

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 102 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

Dicetak Oleh:

UD. Relasi

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA TEBING TINGGI
MENURUT LAPANGAN USAHA 2014-2018**

Tim Penyusun :
Penanggung Jawab Umum : Marlise Simamora SE., MM
Penanggung Jawab Teknis : Saprianto, SE
Penyunting : Saprianto, SE
Penulis : Ayunning Tieas, SST
Pengolah Data : Ayunning Tieas, SST
Gambar Kulit : Zulhamsyah, SE.

<https://tebingtinggikota.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha 2014 - 2018 ini merupakan kelanjutan dari publikasi tahun - tahun sebelumnya yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi. Publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010 dengan penyempurnaan ruang lingkup serta metodologi yang mengacu pada sistem neraca nasional terbaru (*System of National Accounts/SNA 2008*).

Publikasi ini memuat tinjauan mengenai perkembangan perekonomian Kota Tebing Tinggi yang disajikan secara deskriptif. Disamping itu, disajikan pula tabel-tabel PDRB tahun 2014 - 2018 atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase. Sebagai pelengkap ulasan tabel-tabel tersebut, disajikan pula konsep, defenisi dan penjelasan PDRB menurut lapangan usaha. Beberapa angka yang disajikan masih bersifat sangat sementara, terutama angka tahun 2018 karena belum tersedianya data secara lengkap dan akan disempurnakan pada penerbitan selanjutnya.

Kepada semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan publikasi ini, diucapkan terima kasih. Saran perbaikan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Tebing Tinggi, Agustus 2019

Kepala,



Marlise Simamora, SE. MM.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENJELASAN UMUM.....	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto.....	3
1.2. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto	4
1.3. Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto.....	5
BAB II RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN.....	13
2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.....	15
2.2 Pertambangan danPenggalian.....	20
2.3 Industri Pengolahan.....	23
2.4 Pengadaan Listrik dan Gas.....	30
2.5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32
2.6 Konstruksi.....	33
2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.....	34
2.8 Transportasi dan Pergudangan.....	36
2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	40
2.10 Informasi dan Komunikasi.....	42
2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi.....	43
2.12 Real Estat.....	51
2.13 Jasa Perusahaan.....	51
2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.....	54
2.15 Jasa Pendidikan.....	55
2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.....	55
2.17 Jasa Lainnya.....	56

BAB III	TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA TEBING TINGGI.....	59
	3.1 PDRB Kota Tebing Tinggi.....	61
	3.2 Struktur Perekonomian.....	62
	3.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	63
	3.4 PDRB Per Kapita.....	65
	3.5 Sumber Pertumbuhan.....	66
BAB IV	PERKEMBANGAN PRDB MENURUT LAPANGAN USAHA.....	69
	4.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.....	71
	4.2 Pertambangan dan Penggalan	73
	4.3 Industri Pengolahan	74
	4.4 Pengadaan Listrik dan Gas	76
	4.5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	77
	4.6 Konstruksi	78
	4.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	79
	4.8 Transportasi dan Pergudangan	81
	4.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	83
	4.10 Informasi dan Komunikasi	84
	4.11 Jasa Keuangan dan Asuransi	85
	4.12 Real Estat	86
	4.13 Jasa Perusahaan	87
	4.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	88
	4.15 Jasa Pendidikan	89
	4.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89
	4.17 Jasa Lainnya	90
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	9
Tabel 1.2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010	10
Tabel 1.3 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	11
Tabel 3.1 PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2014-2018 (Juta Rupiah)	61
Tabel 3.2 Perbandingan PDRB Kota Tebing Tinggi dengan Kab/Kota lain dan Peranannya Terhadap PDRB SUMUT dan PDB Indonesia (ADHB dan ADHK) 2010,Tahun 2018 (Juta Rupiah)	61
Tabel 3.3 Peranan PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (Persen)	62
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha,2014-2018 (Persen)	64
Tabel 3.5 PDRB Perkapita Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2014-2018 (Ribu Rupiah)..	65
Tabel 4.1 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2014-2018	71
Tabel 4.2 Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, 2014-2018 (Persen)	72
Tabel 4.3 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian di Kota Tebing Tinggi, 2014-201...	73
Tabel 4.4 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kota Tebing Tinggi, 2014-2018.....	74

Tabel 4.5	Peranan dan Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha (Kontribusi Terbesar) terhadap PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 (Persen)	75
Tabel 4.6	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas di Kota Tebing Tinggi, 2014-2018	76
Tabel 4.7	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, di Kota Tebing Tinggi 2014-2018	78
Tabel 4.8	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi di Kota Tebing Tinggi, 2014-2018	78
Tabel 4.9	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2014-2018	79
Tabel 4.10	Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 (Persen)	80
Tabel 4.11	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Kota Tebing Tinggi, 2014-2018.	81
Tabel 4.12	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 2014-2018	83
Tabel 4.13	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Tebing Tinggi, 2014-2018	85
Tabel 4.14	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Real Estat di Kota Tebing Tinggi, 2014-2018	86
Tabel 4.15	Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 (Persen)	87
Tabel 4.16	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan Kota Tebing Tinggi, 2014-2018	89

Tabel 4.17	Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 (Persen)	90
Tabel 4.18	PDRB, Peranan, dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Lainnya Kota Tebing Tinggi, 2014-2018	90

<https://tebingtinggikota.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 3.1	Peranan PDRB ADH Berlaku Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha, 2018 (Persen)	63
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi dan PDRB Sumatera Utara, 2014-2018 (Persen)	65
Gambar 3.3	PDRB per Kapita Kota Tebing Tinggi ADHB dan ADHK 2010, 2014-2018 (Ribu Rupiah)	66
Gambar 3.4	Sumber Pertumbuhan Ekonomi PDRB Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (Persen)	66
Gambar 4.1	Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian , 201di Kota Tebing Tinggi 2014-2018 (Persen)	70
Gambar 4.2	Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian selain Minyak, Gas, Panas Bumi, Batu Bara, Lignit dan Bijih Logam Kota Tebing Tinggi 2014 dan 2018 (Persen)	72
Gambar 4.3	Peranan dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Kota Tebing Tinggi 2014-2018 (Persen)	75
Gambar 4.4	Peranan dan Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha Pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 (Persen)	77
Gambar 4.5	Peranan dan Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Konstruksi Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 (Persen)	79
Gambar 4.6	Peranan Sublapangan Usaha dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 (Persen)	80
Gambar 4.7	Peranan Sublapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Kota Tebing Tinggi, 2018 (Persen)	82
Gambar 4.8	Peranan Sublapangan Usaha dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Kota Tebing Tinggi ,	

	2014-2018 (Persen)	82
Gambar 4.9	Pertumbuhan Sublapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 (Persen)	84
Gambar 4.10	Peranan dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 (Persen)	84
Gambar 4.11	Peranan Sublapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Tebing Tinggi, 2014 dan 2018 (Persen)	86
Gambar 4.12	PDRB ADHB dan ADHK 2010 Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 (Juta Rupiah)	87
Gambar 4.13	PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kota Tebing Tinggi, 2014-2018	88
Gambar 4.14	PDRB ADHB dan ADHK 2010 Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 (Juta Rupiah)	89

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014–2018 (Juta Rupiah)	91
Tabel 2. PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2014–2018 (Juta Rupiah)	92
Tabel 3. Distribusi PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014–2018 (Persen)	93
Tabel 4. Distribusi PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2014–2018 (Persen)	94
Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014–2018 (Persen)	95
Tabel 6. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2014–2018 (Persen)	96
Tabel 7. Indeks Perkembangan PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014–2018 (2010 = 100)	97
Tabel 8. Indeks Perkembangan PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2014–2018 (2010 = 100)..	98
Tabel 9. Indeks Implisit PDRB Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha, 2014–2018 (Persen)	99
Tabel10. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha, 2014–2018 (Persen)	100



<https://tebingtinggikota.pps.go.id>



PENJELASAN UMUM



1.1 *Pengertian Produk Domestik Regional Bruto*

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala. Data/indikator statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Apa yang Dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.2 *Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto*

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

1.3 *Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto*

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang Dimaksud SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

<https://tebingtinggikota.bps.go.id>

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index* /PPI);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

¹ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB Tahun Dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- **Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress (WIP)* pada *Cultivated Biological Resources (CBR)*:**

Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

- **Metodologi : Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge (IBSC)* menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)***

- **Valuasi : Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*).**

Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

- **Klasifikasi :**

Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional Standard Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

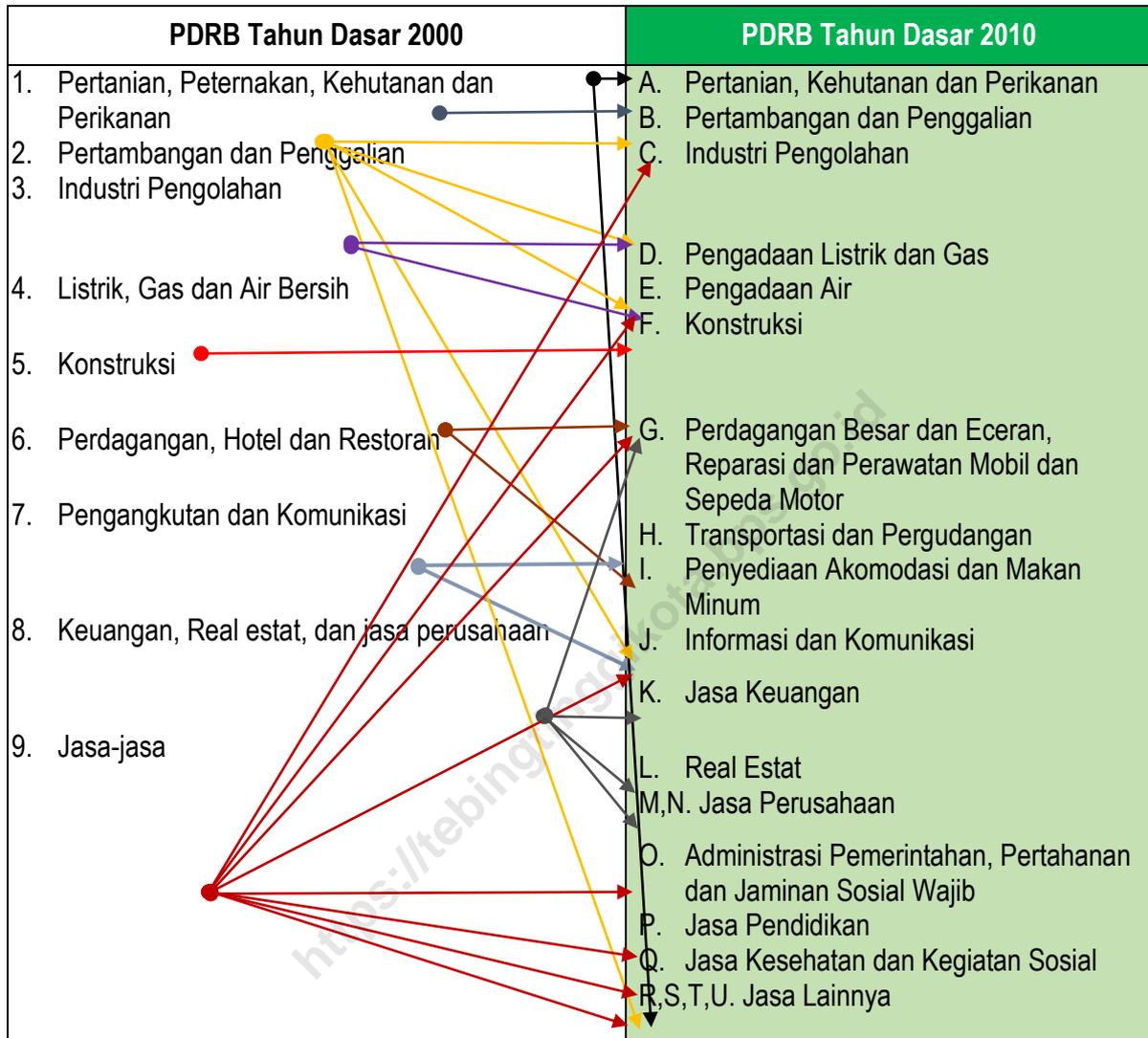
Tabel 1.1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge</i> (IBSC) .	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured</i> (FISIM)
3. Valuasi	Harga Produsen:	Harga Dasar:
4. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010



Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti tabel berikut :

Tabel 1.3 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 4. Perubahan Inventori 5. Ekspor 6. Impor	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6. Ekspor 7. Impor



2

RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN



Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

2.1.1.1 Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam subkategori tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Sumatera Utara. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sumatera Utara. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman

pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS dan data dari Bidang Produksi BPS Provinsi Sumatera Utara.

2.1.1.2 Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Sumatera Utara. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sumatera Utara. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) dan data dari Bidang Produksi BPS Provinsi Sumatera Utara.

2.1.1.3 Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-

lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bidang Produksi Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sumatera Utara. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) dan data dari Bidang Produksi BPS Provinsi Sumatera Utara.

2.1.1.4 Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Subkategori ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Sensus Pertanian, dan Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Sumatera Utara. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sumatera Utara. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) dan data dari Bidang Produksi BPS Provinsi Sumatera Utara.

2.1.1.5 Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output

kegiatan pertanian diperoleh dari Subdit Neraca Barang BPS RI. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS RI. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan satwa liar yang datanya diperoleh dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.1.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dan Sensus Pertanian. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan dan Pembudidaya Tanaman Kehutanan) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

2.1.3 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan Sensus Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sumatera Utara. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS RI dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Perusahaan Perikanan yang

dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) dan data dari Bidang Produksi BPS Provinsi Sumatera Utara.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources (CBR)*. Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress (WIP)*. Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP dari seluruh komoditas ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2 *Pertambangan dan Penggalian*

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan minyak

dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

2.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Subkategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Subkategori ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Sensus Ekonomi. Data Harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian ESDM, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Lap. Keuangan Perusahaan, BEI dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price (ICP)*, harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencarian (*liquefaction*). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan

penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. NTB atas dasar harga konstan 2010 didapat dengan menggunakan cara yang sama seperti pada subsektor pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kotamadya; Dinas Pendapatan Daerah.

2.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Subkategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

2.2.4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada

permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subsektor ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik penggalian tahunan. Sementara itu PDRB triwulan di estimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi.

2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.3.1 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, di mana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19

2.3.2 Industri Makanan dan Minuman

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri minuman mencakup pembuatan minuman baik minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur. dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk the dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12

2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: spreng, taplak meja, gordain, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15

2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Subkategori ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16

2.3.7 Industri Kertas & Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekam. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai tehnik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama.

Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Subkategori ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Subkategori ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Subkategori ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di subkategori ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

2.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.

2.3.11 Industri Logam Dasar

Subkategori ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 24

2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.

2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam Subkategori Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28

2.3.14 Industri Alat Angkutan

Subkategori ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari subkategori ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat

udara dan pesawat angkasa. Subkategori ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009: kode 29 dan 30.

2.3.15 Industri Furnitur

Industri Furnitur mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31

2.3.16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi terdiri dari: Data produksi Pengilangan Migas diperoleh dari, Sensus Ekonomi dan Survei IBS Tahunan Bidang Statistik Produksi Provinsi Sumatera Utara. Data produksi/indikator produksi Industri Batubara diperoleh dari Sensus Ekonomi dan Survei IBS Tahunan Bidang Statistik Produksi Provinsi Sumatera Utara. Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga LNG diperoleh dari harga ekspor LNG dari Direktorat

Statistik Distribusi, BPS dengan kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran, BPS RI; sedangkan indikator harga untuk Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, BPS RI. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas, BPS RI.

Sumber data Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri dari: Produksi/Indikator Produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Sensus Ekonomi dan Survei IBS Tahunan Bidang Statistik Produksi Provinsi Sumatera Utara; Data Harga/Indikator Harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, BPS RI ; Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK, BPS ditambah dengan berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Dalam penghitungan NTB Industri pengolahan subkategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.4.1 Ketenagalistrikan

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Penilaian PDB listrik menggunakan harga dasar, sementara penilaian PDRB listrik menggunakan harga produsen. Harga produsen didapat dengan mengalikan kuantum listrik terjual dengan harga jual tersubsidi. Sementara

harga dasar diestimasi dari harga produsen ditambahkan dengan subsidi yang ditanggung oleh pemerintah dan dikurangi pajak.

2.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Subkategori ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Subkategori ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian perubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan yang digunakan untuk seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN (Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT. PGN setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan

terakhir. Sumber data Produksi Es menggunakan data Sensus Ekonomi, dan harga diestimasi dari harga produsen.

2.5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 sama dengan seri 2000 dengan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan Sampah/Limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber Data: untuk data Produksi adalah data produksi air bersih PDAM Tirtanadi, data Harga berasal dari harga produsen air bersih PDAM Tirtanadi. Data Output Sampah diperoleh dari estimasi jumlah rumah tangga per kabupaten/kota dikalikan estimasi pengeluaran untuk pengelolaan sampah per rumah tangga SUSENAS.

2.6 *Konstruksi*

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil. baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan Output harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, Output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara input

antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari input antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data berasal dari realisasi APBN/APBD untuk belanja modal provinsi dan kabupaten/kota, data harga konstruksi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara, data konstruksi dari Bidang Statistik Sosial Provinsi Sumatera Utara, dan estimasi SUSENAS dari Bidang Statistik Sosial Provinsi Sumatera Utara.

2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer

memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

2.7.1 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir *dalam* pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstan, nilai tambah berlaku yang diperoleh di-*deflate* menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, estimasi SUSENAS untuk pengeluaran pembelian kendaraan bermotor, dan reparasi kendaraan bermotor, Statistik Transportasi (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS RI.

2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.8.1 Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

2.8.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter/sewa* kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta *jasa angkutan dengan saluran pipa* untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkut). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/ armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan perusahaan angkutan darat *go public*. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.8.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), dan perusahaan pelayaran swasta lainnya dan IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS RI. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

2.8.4 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan BPS RI dan Kementerian Perhubungan. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS RI. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia.

2.8.5 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan PT Merpati Nusantara Airlines; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.8.6 Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public*. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung

dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti : PT Angkasa Pura II, PT Pelabuhan Indonesia I, PT Jasa Marga, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.9.1 Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan

indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata BPS RI dan Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara.

2.9.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi subkategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 – Bidang Statistik Sosial Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi – BPS.

2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya, tercakup di sini. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan muatan atau isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi

tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari estimasi pengeluaran rumah tangga untuk informasi dan komunikasi SUSENAS dari Bidang Statistik Sosial Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdit Statistik Harga Konsumen-BPS.

2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.11.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan yang dicakup didalam Jasa Perantara Keuangan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan Jasa Perantara Keuangan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, baik bank pemerintah pusat dan daerah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari pendekatan alokasi kredit yang disalurkan oleh Bank Indonesia.

2.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Subkategori ini mencakup kegiatan

asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data diperoleh dari pengeluaran untuk asuransi rumah tangga SUSENAS dari Bidang Statistik Sosial Provinsi Sumatera Utara, dan pengeluaran untuk asuransi perusahaan dari struktur biaya Survei Khusus Neraca Produksi. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pension. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data diperoleh dari estimasi pengeluaran/penerimaan dana pensiun rumah tangga dari SUSENAS, Bidang Statistik Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.11.3 Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan jasa keuangan yang mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari PT Pegadaian. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan *leasing* lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan

pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data diperoleh dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data diperoleh dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.11.4 Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berasal dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data diperoleh dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT

KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berasal dari Sensus Ekonomi dari direktori perusahaan Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berasal dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berasal dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik bertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berasal dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan

diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk, dari Bidang Statistik Sosial Provinsi Sumatera Utara. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

2.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksaan

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya. Termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Jasa Periklanan

Jasa periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan

menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan social wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini., meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistim sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut subkategori kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan Pendekatan Produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan Pendekatan Deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBD; Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.17 *Jasa Lainnya*

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R di dalam KBLI 2009. Kategori ini meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara

rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/ indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi diperoleh dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara, dan Survei-survei Khusus yang Dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran.

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku untuk Jasa Lainnya diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Sumber data yang diperlukan berasal dari data penunjang intern BPS (Sensus Ekonomi, Susenas, Statistik Harga Konsumen).

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T di KBLI 2009, mencakup kegiatan yang memanfaatkan Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun,

supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Untuk kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, (pertanian, industri, konstruksi, penggalian) output dan NTB berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu, Susenas dan Sensus Penduduk dari Bidang Statistik Sosial Provinsi Sumatera Utara, Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori ini berkategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The Internasional Moneter Fund, The World Bank, The World Customs Organization(WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development(OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries(OPEC) dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum.

Sumber data diperoleh dari direktori perusahaan Sensus Ekonomi dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Sumatera Utara dan Statistik Harga Konsumen.



3

TINJAUAN PEREKONOMIAN



3.1. PDRB Kota Tebing Tinggi

PDRB Kota Tebing Tinggi atas dasar harga berlaku (ADHB) pada Tahun 2018 mencapai 5.512.517,21 juta rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 3.760.504,52 juta rupiah. Selama lima tahun terakhir (2014-2018), PDRB Kota Tebing Tinggi terus mengalami peningkatan baik secara harga berlaku (ADHB) maupun secara harga konstan (ADHK).

Tabel 3.1 PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
(1)	(2)	(3)
2014	3.912.175,21	3.084.172,07
2015	4.287.864,13	3.235.299,89
2016	4.725.478,51	3.400.749,17
2017*	5.123.015,86	3.575.505,22
2018**	5.512.517,21	3.760.504,52

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Jika dibandingkan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, maka PDRB Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 menduduki peringkat ke-26 (dua puluh enam) di Sumatera Utara, atau satu peringkat di bawah Kabupaten Humbang Hasundutan. Sementara itu, PDRB Kota Tebing Tinggi ini terlihat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan daerah lain yang berada di sekitarnya seperti Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, dan Kota P. Siantar. Adapun peranan PDRB ADHB Kota Tebing Tinggi terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 adalah 0,74 persen, sedangkan terhadap PDB Nasional sebesar 0,04 persen.

Tabel 3.2. Perbandingan PDRB Kota Tebing Tinggi dengan Kabupaten/Kota Lain dan Perannya terhadap PDRB Sumatera Utara dan PDB Indonesia (ADHB dan ADHK 2010), Tahun 2018 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	ADH Berlaku **	ADH Konstan**	Peranan terhadap PDRB Sumut (%)**	Peranan terhadap PDB Nasional (%)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Tebing Tinggi	5.512.517,21	3.760.504,52	0,74	0,04
Humbang Hasundutan	5.523.753,49	3.946.119,77	0,75	0,04
Deli Serdang	101.120.213,37	68.340.998,98	13,64	0,70
Serdang Bedagai	25.994.818,88	18.421.380,28	3,51	0,18
Pematang Siantar	13.176.710,84	9.170.185,70	1,78	0,09
Sumatera Utara	741.192.693,75	512.765.628,04	100,00	-
Indonesia (Milyar Rp)	14.387.357,50	10.425.316,30	-	100,00

** Angka sangat sementara

3.2. Struktur Perekonomian

Berdasarkan strukturnya, lapangan usaha (lapus) yang berkontribusi terbesar di Kota Tebing Tinggi antara lain sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Kontruksi; Industri Pengolahan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal tersebut terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapus tersebut terhadap pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi yakni lapus Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil berperan sebesar 22,73 persen, disusul lapus Kontruksi dengan peran 14,76 persen, lalu lapus Industri Pengolahan yang berperan sebanyak 12,81 persen serta lapus Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan peran sebesar 11,61 persen. Sementara itu, lapus lainnya masing-masing berperan di bawah 10 (sepuluh) persen.

Tabel 3.3 Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha, 2014–2018 (Persen)

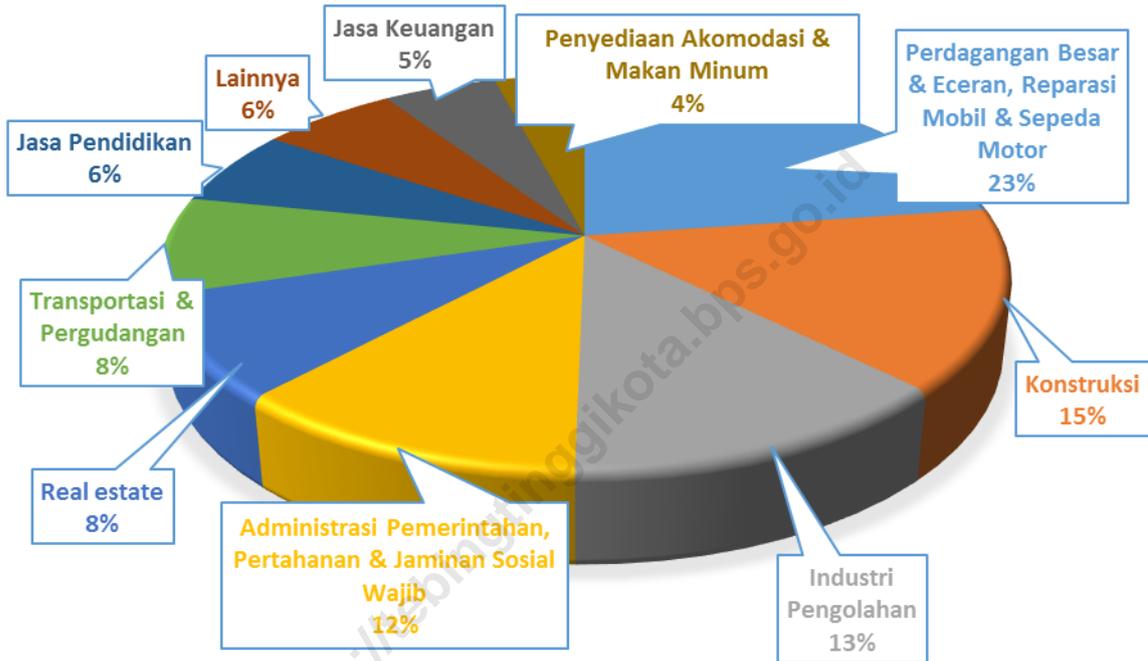
Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,41	1,35	1,31	1,27	1,28
B Pertambangan dan Penggalian	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14
C Industri Pengolahan	14,4	13,48	13,11	13,30	12,81
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,14	0,13	0,14	0,14
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,21	0,22	0,24	0,25	0,24
F Konstruksi	14	14,2	14,19	14,45	14,76
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,02	20,7	21,51	21,98	22,73
H Transportasi dan Pergudangan	7,83	7,9	8,01	8,07	7,98
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,31	4,27	4,16	4,15	4,13
J Informasi dan Komunikasi	1,98	1,92	1,88	1,89	1,89
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5,86	5,81	5,56	5,31	5,18
L Real Estat	8,27	8,31	8,36	8,32	8,33
M,N Jasa Perusahaan	0,5	0,49	0,49	0,48	0,46
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,88	12,29	12,29	11,93	11,61
P Jasa Pendidikan	6,93	6,66	6,52	6,26	6,24
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,08	1,09	1,10	1,15
R,S,T,U Jasa lainnya	1,02	1,01	0,98	0,94	0,92
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Adapun lapus Pengadaan Listrik dan Gas; lapus Pertambangan dan Penggalian; dan lapus Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang merupakan pemberi sumbangan terkecil terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018, dengan kontribusinya secara berurutan adalah sebesar 0,14 persen; 0,14 persen dan 0,24 persen.

Gambar 3.1. Peranan PDRB ADH Berlaku Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha, 2018 (Persen)



3.3. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2018 mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB ADHK Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 mencapai 5,17 persen yakni lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,14 persen. Sejak tahun 2014 pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing Tinggi tercatat selalu mengalami percepatan, kecuali pada tahun 2015 yang mengalami perlambatan akibat pertumbuhan global yang lesu.

Namun demikian, jika dilihat per lapangan usaha (lapus), pada tahun 2018 hanya ada 5 (lima) lapus yang tercatat mencatat mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Kelima lapus tersebut beserta laju pertumbuhannya yakni lapus Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (4,01 persen) ; lapus Jasa Keuangan dan Asuransi (1,98 persen); lapus

Jasa Pendidikan (4,99 persen); lapus Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6,24 persen); lapus Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8,76 persen).

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha 2014–2018 (Persen)

LAPANGAN USAHA		2014	2015	2016	2017*	2018**
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,17	5,29	4,56	4,58	4.09
B	Pertambangan dan Penggalian	4,46	4,1	4,4	5,07	3.40
C	Industri Pengolahan	0,4	-1,8	3	2,65	2.06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,77	8,23	3,4	4,35	2.95
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,33	8,63	6,41	6,94	3.08
F	Konstruksi	6,29	6,6	6,62	6,87	5.42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,84	7,21	8,37	8,40	8.76
H	Transportasi dan Pergudangan	6,82	6,51	5,24	7,07	4.95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,82	4,96	5,02	5,27	6.24
J	Informasi dan Komunikasi	5,13	5,22	5,78	6,07	6.00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,89	3,22	2,45	-0,06	1.98
L	Real Estat	4,39	4,45	4,83	4,93	3.53
M,N	Jasa Perusahaan	3,86	2,07	2,96	2,03	1.54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,57	7,71	1,82	1,13	4.01
P	Jasa Pendidikan	4,37	4,11	3,8	3,89	4.99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,5	7,62	7,69	7,94	7.35
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,62	3,32	3,18	3,60	3.21
Produk Domestik Regional Bruto		5,45	4,90	5,11	5,14	5,17

* Angka sementara

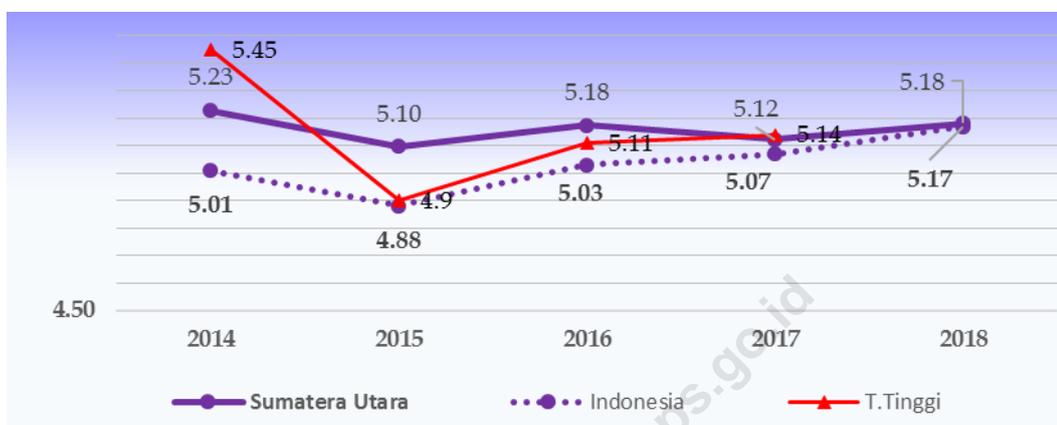
** Angka sangat sementara

Secara pola, pertumbuhan ekonomi (ADHK) Kota Tebing Tinggi mengalami pertumbuhan yang hampir sama dengan pola pertumbuhan ekonomi Indonesia (Nasional) sejak tahun 2014 hingga 2018. Keduanya terus mengalami percepatan pertumbuhan kecuali pada tahun 2015 dimana sedikit mengalami perlambatan. Hal tersebut sedikit berbeda jika dibandingkan dengan pola pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang tidak hanya mengalami perlambatan pada tahun 2015 tapi juga pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi (ADHK) Kota Tebing Tinggi tercatat sama besar sebagaimana pada level Nasional, yakni 5,17 persen. Nilai

tersebut berada sedikit di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera yang sebesar 5,18 persen.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK
Gambar 3.2. Kota Tebing Tinggi dan Sumatera Utara serta PDB ADHK Nasional, Tahun 2014-2018 (Persen)



3.4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Nilai PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

Tabel 3.5 Nilai dan Pertumbuhan PDRB per kapita Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2014-2018 (Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku		ADH Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	25.271.796,68	9,73	19.923.077,37	4,56
2015	27.343.456,48	8,20	20.631.316,47	3,55
2016	29.738.319,91	8,76	21.401.550,46	3,73
2017*	31.882.154,37	7,21	22.251.504,28	3,97
2018**	33.906.281,86	6,35	23.130.036,87	3,95

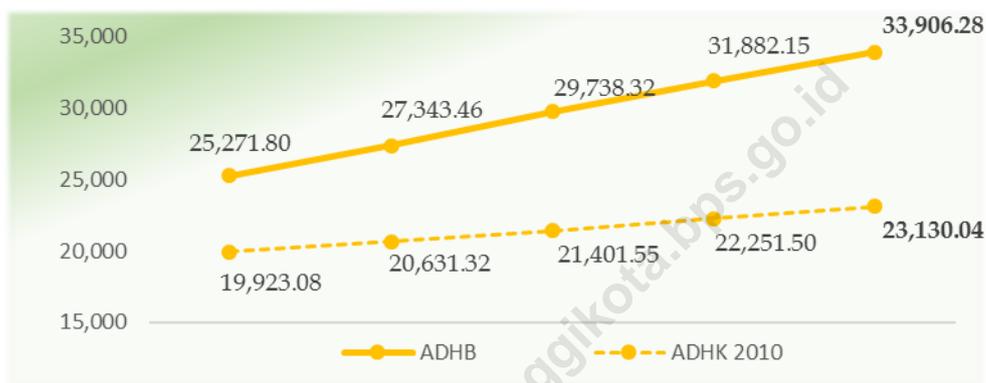
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

PDRB per kapita Kota Tebing Tinggi atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 33.906.281,86 rupiah. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Rp 31.882.154,37 atau dengan kata lain bertumbuh sebesar 6,35 persen. Pertumbuhan PDRB ADHB per kapita tersebut cenderung melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), tercatat nilai PDRB ADHK per kapita di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 23.130.036,87. Nilai tersebut tumbuh sebesar 3,95 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut gambaran perkembangan nilai PDRB per kapita ADHB dan ADHK 2010 di Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2014 hingga 2018:

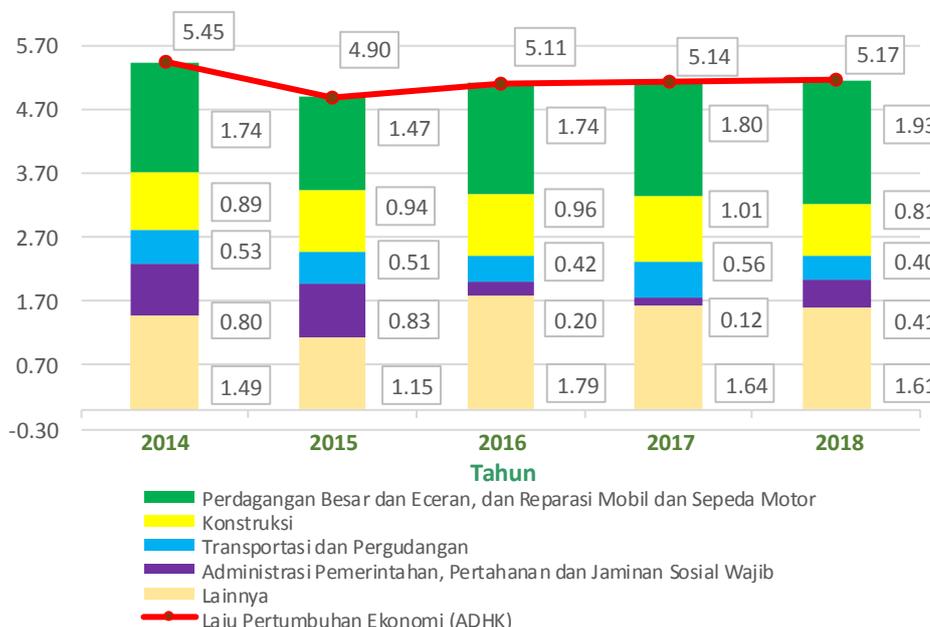
Gambar 3.3 Nilai PDRB per kapita Kota Tebing Tinggi ADHB dan ADHK 2010, 2014-2018 (Ribu Rupiah)



3.5. Sumber Pertumbuhan

Gambaran sumber pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2014 hingga 2018 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4 Sumber Pertumbuhan Ekonomi PDRB Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (Persen)



Sejak tahun 2014 hingga 2018, lapangan usaha (lapus) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sumber terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing Tinggi yakni selalu bernilai di atas 1 persen. Bahkan pada tahun 2018 dengan laju pertumbuhan ekonomi (ADHK) Kota Tebing Tinggi sebesar 5,17 persen, hampir dua persennya (yakni 1,93 %) bersumber dari lapus Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Selain itu, yang juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar di Kota Tebing Tinggi adalah lapus Konstruksi serta lapus Transportasi dan Pergudangan yang terus memainkan peran penting sejak tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 0,81 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari lapus Konstruksi dan sebanyak 0,31 persen adalah dari lapus Transportasi dan Pergudangan.

Sementara itu, lapus Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib termasuk sumber pertumbuhan ekonomi yang cukup berpengaruh di Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2014, namun sempat mengecil perannya pada tahun 2016 dan 2017 sebelum akhirnya kembali naik pada tahun 2018 (sebesar 0,41 persen).



4

PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Pendapat Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dirinci ke dalam 17 (tujuh belas) lapangan usaha. Sebagian besar lapangan usaha dapat dirinci lagi menjadi sublapangan usaha. Perincian tersebut disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Adapun perkembangan kondisi PDRB pada tahun 2014-2018 di Kota Tebing Tinggi menurut 17 (tujuh belas) lapangan usaha tersebut diuraikan di bawah ini.

4.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha ini mencakup (i) Sublapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (yang terdiri atas Tanaman Pangan; Tanaman Hortikultura Semusim; Perkebunan Semusim; Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya; Perkebunan Tahunan; Peternakan; serta Jasa Pertanian dan Perburuan); (ii) Sublapangan Usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan (iii) Sublapangan Usaha Perikanan.

Tabel 4.1 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018

URAIAN	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	55 132,57	57 944,67	62 091,89	65 279,60	70 561,6
- ADHK 2010	44 810,89	47 179,37	49 330,91	51 592,24	53 704,3
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	1,41	1,35	1,31	1,27	1,28
Pertumbuhan (% - ADHK 2010)	1,17	5,29	4,56	4,58	4,09
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,98	5,38	4,58	4,58	4,25
b. Kehutanan&Penebangan Kayu	0,84	-0,63	0,60	0,81	0,92
c. Perikanan	5,23	5,31	5,36	5,66	1,96

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tahun 2018, nilai PDRB ADHB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 70,6 milyar rupiah, sedangkan nilai PDRB ADHK nya mencapai 53,7 milyar rupiah. Lapangan usaha ini memberi kontribusi terhadap pembentukan PDRB total sebesar 1,28 persen, meningkat dari tahun lalu yaitu 1,27 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami perlambatan dari 4,58 persen pada tahun 2017 menjadi 4,09 persen pada tahun 2018. Jika dirinci berdasarkan sublapangan usahanya, terlihat bahwa pertumbuhan tercepat terjadi pada Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian disusul oleh sublapangan usaha Perikanan dan kemudian sublapangan usaha Kehutanan & Penebangan Kayu.

Tabel 4.2 Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018 (Persen)

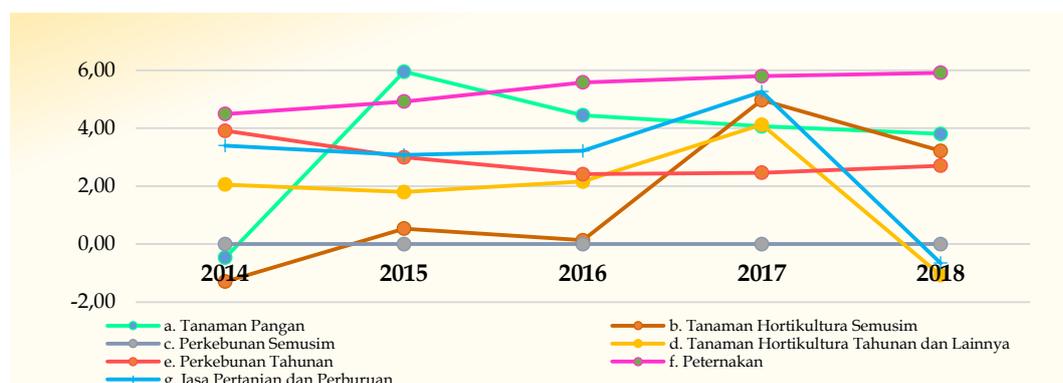
LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	93,63	93,41	93,44	93,30	93,43
a. Tanaman Pangan	67,03	66,33	66,18	65,48	65,38
b. Tanaman Hortikultura Semusim	2,83	2,88	2,77	2,78	2,68
c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1,91	1,94	1,91	1,90	1,76
e. Perkebunan Tahunan	0,68	0,62	0,62	0,63	0,59
f. Peternakan	26,61	27,25	27,56	28,18	28,59
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,94	0,97	0,97	1,03	0,98
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,47	1,48	1,40	1,35	1,31
3 Perikanan	4,90	5,11	5,16	5,35	5,26
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penyumbang terbesar pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 adalah sublapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (93,43 persen) diikuti oleh sublapangan usaha Perikanan (5,26 persen) dan kemudian sublapangan usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu (1,31 persen). Adapun pada sublapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian tersebut jika dirinci lagi, tercatat bahwa pemberi peran terbesar adalah Tanaman Pangan (65,38 persen) dan Peternakan (28,59 persen). Sementara itu, laju pertumbuhan (ADHK) pada setiap rincian di sublapangan usaha tersebut sejak tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Grafik 4.1.

Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018 (persen)



Diketahui bahwa sejak tahun 2014 hingga 2018 rincian yang terus mengalami peningkatan pertumbuhan adalah Peternakan. Adapun (6) enam rincian lainnya tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2 *Pertambangan dan Penggalian*

PDRB ADHB lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian tahun 2018 mencapai 7,8 milyar rupiah. Sumbangannya terhadap pembentukan total PDRB di Kota Tebing Tinggi relatif kecil yaitu hanya 0,14 persen dimana kontribusi tersebut tercatat terus mengalami penurunan sejak tahun 2014 hingga 2018.

Adapun laju pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian ini selalu menunjukkan nilai yang positif meskipun fluktuatif. Pertumbuhan lapangan usaha tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar 3,40 persen dimana merupakan yang terkecil sepanjang lima tahun terakhir.

Tabel 4.3 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018

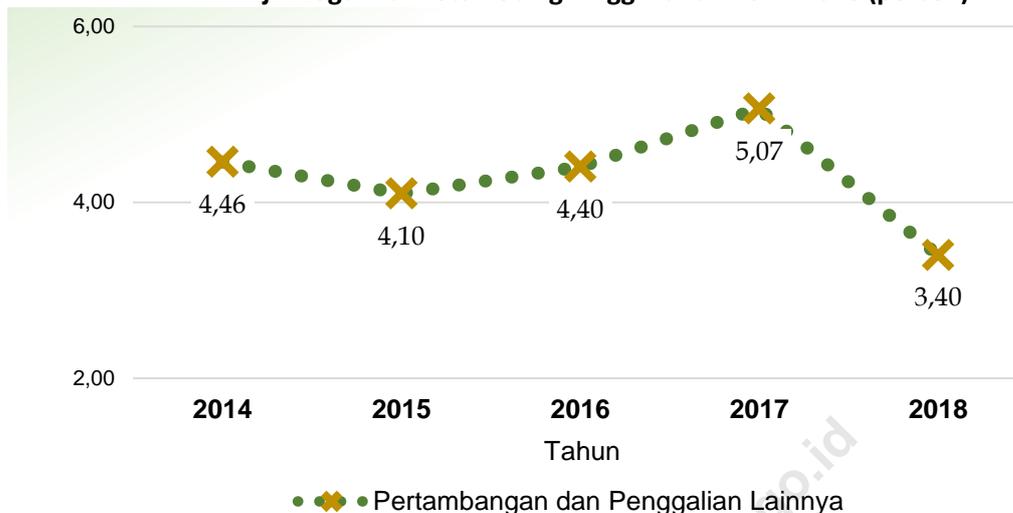
U R A I A N	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	6 470,47	6 967,35	7 400,36	7 565,16	7 839,9
- ADHK 2010	5 307,65	5 525,27	5 768,64	6 060,89	6 267,0
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,46	4,10	4,40	5,07	3,40

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Di Kota Tebing Tinggi sublapangan usaha yang berperan terhadap PDRB ADHB lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian ini hanyalah dari Pertambangan dan Penggalian Selain Minyak, Gas, Panas Bumi, Batubara, Lignit, dan Bijih Logam. Hal tersebut dikarenakan Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi; Pertambangan Batubara dan Lignit; dan Pertambangan Bijih Logam masih belum ada di Kota Tebing Tinggi sampai tahun 2018 ini. Adapun perkembangan laju pertumbuhan sublapangan usaha tersebut sejak tahun 2014 hingga 2018 dapat dilihat pada Grafik 4.2 berikut.

Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Selain Minyak, Gas, Panas Bumi, Batubara, Lignit, dan Bijih Logam di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018 (persen)



4.3 Industri Pengolahan

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Industri Pengolahan tahun 2018 di Kota Tebing Tinggi mencapai 706,2 milyar rupiah, sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 nya mencapai 484,8 milyar rupiah. Lapangan usaha ini berperan sebesar 12,81 persen terhadap PDRB di Kota Tebing Tinggi di tahun 2018. Kontribusinya tersebut menurun jika dibandingkan kondisi sejak tahun 2014.

Tabel 4.4 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018

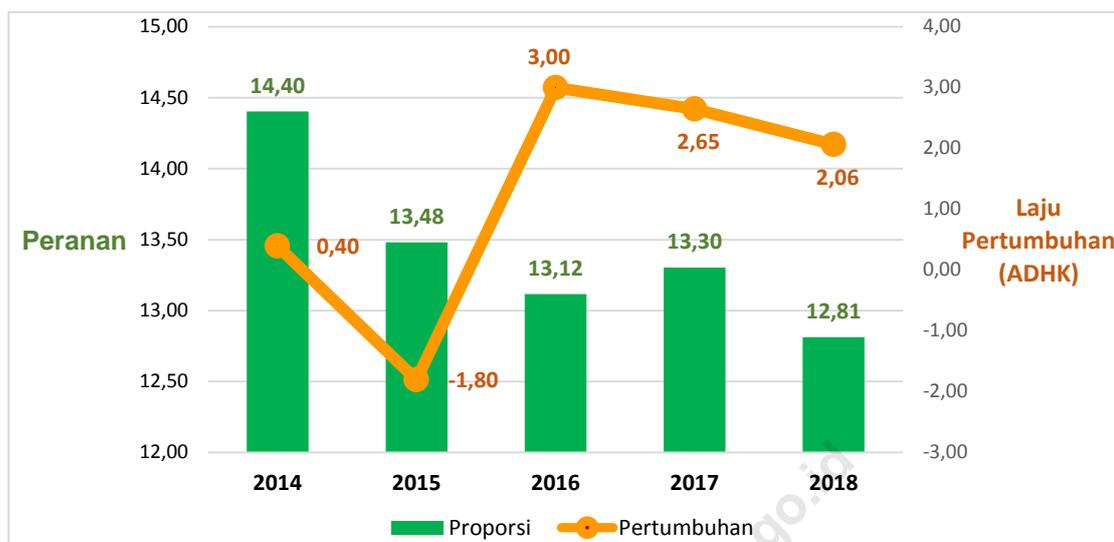
U R A I A N	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	563 506,23	578 083,51	619 874,53	681 509,58	706 291,8
- ADHK 2010	457 564,40	449 309,78	462 783,95	475 043,60	484 844,6
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	14,40	13,48	13,12	13,30	12,81
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	0,40	-1,80	3,00	2,65	2,06

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Laju pertumbuhan industri pengolahan tahun 2018 adalah sebesar 2,06 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai 2,65 persen. Laju pertumbuhan Industri Pengolahan pada tahun 2018 ini tercatat sebagai yang paling lambat dalam tiga tahun terakhir (sejak 2015).

Gambar 4.3 Peranan dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018 (Persen)



Sublapangan usaha yang berperan pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan ini beserta laju pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Peranan dan Laju Pertumbuhan per Sublapangan Usaha (Kontribusi Terbesar) terhadap PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan, di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018 (Persen)

SUBLAPANGAN USAHA		2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Peranan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	82,58	80,82	80,04	79,46	78,43
2	Industri Makanan dan Minuman	13,05	14,53	15,45	16,28	17,22
3	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	1,57	1,71	1,62	1,58	1,63
4	Industri Furnitur	1,25	1,31	1,29	1,18	1,19
Laju Pertumbuhan		0,40	-1,80	3,00	2,65	2,06
1	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-0,64	-3,57	2,14	2,19	1,24
2	Industri Makanan dan Minuman	6,96	8,37	7,81	5,45	6,12
3	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	2,36	2,16	2,67	3,09	2,98
4	Industri Furnitur	-0,68	-2,30	3,94	-0,59	2,12

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sublapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar pada tahun 2018 adalah Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik yaitu sebesar 78,43 persen, diikuti oleh Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 17,22 persen, lalu Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik

sebesar 1,63 persen, dan kemudian Industri Furnitur yang berperan sebesar 1,19 persen. Sedangkan jenis industri lainnya masing-masing hanya berkontribusi di bawah 1 (satu) persen.

Laju pertumbuhan sublapangan usaha Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik sebagai kontributor mencapai 1,24 persen tahun 2018, melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun sublapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan tercepat adalah sublapangan usaha Industri Makanan dan Minuman yakni sebesar 6,12 persen, yang mana naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan sublapangan usaha Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik serta sublapangan usaha Industri Furnitur berkisar di 2 (dua) persen.

4.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,14 persen terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018. Nilai tersebut tidak jauh berbeda dengan keadan selama lima tahun terakhir (sejak 2014). Total nilai PDRB yang dihasilkan dari lapangan usaha ini secara harga berlaku maupun harga konstan (2010) secara berturut-turut adalah 7,7 milyar rupiah dan 7,1 milyar rupiah.

Tabel 4.6 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas, di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018

URAIAN	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	5 684,71	5 972,47	6 328,96	7 164,55	7 721,7
- ADHK 2010	5 918,03	6 404,88	6 622,42	6 910,49	7 114,4
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,15	0,14	0,13	0,14	0,14
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	8,77	8,23	3,40	4,35	2,95

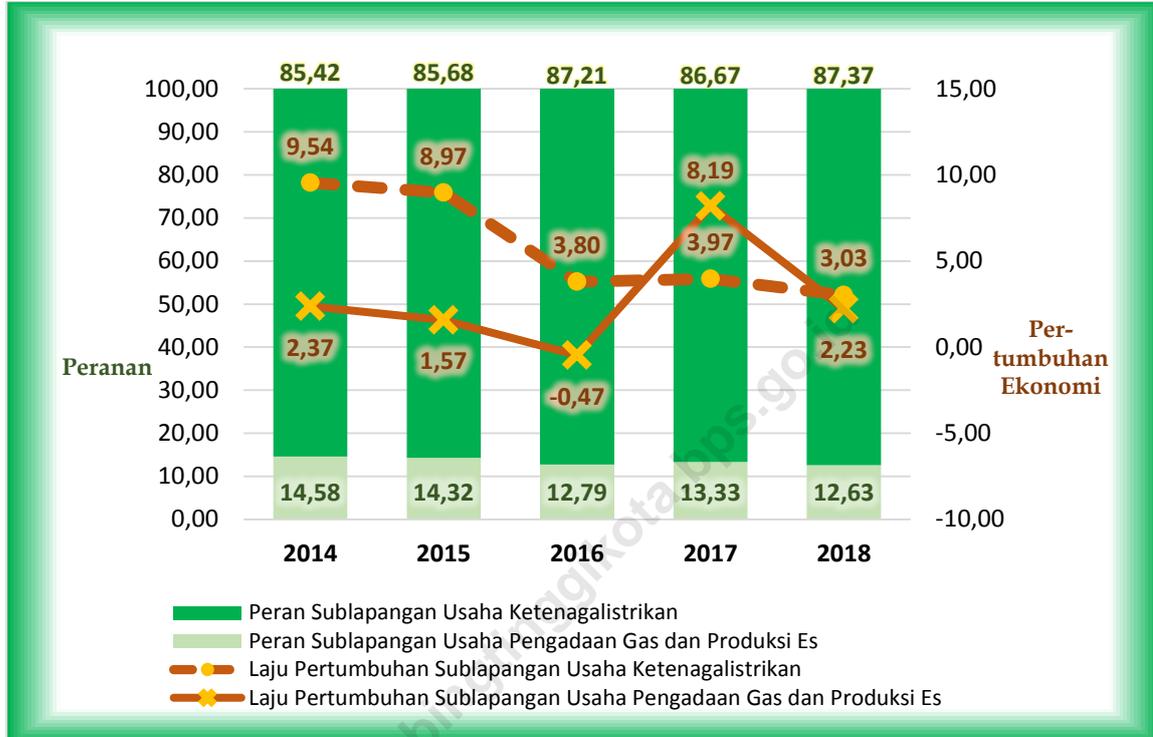
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini pada tahun 2018 sebesar 2,95 persen, mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,35 persen. Hal ini disebabkan terjadinya perlambatan terutama pada sublapangan usaha Pengadaan Gas dan Produksi Es yang semula tumbuh sebesar 9,19 persen pada

tahun 2017 menjadi 2,23 persen pada tahun 2018 sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 4.4 Peranan dan Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018 (Persen)



Jika ditinjau berdasarkan peranan, pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas tersebut yang memiliki proporsi peran terbesar adalah sublapangan usaha Ketenagalistrikan yang selalu berperan di atas 80 persen sejak tahun 2014. Sementara itu, sublapangan usaha lainnya yakni Pengadaan Gas dan Produksi Es berperan sebesar 12,63 persen pada tahun 2018. Kontribusi sublapangan usaha tersebut tercatat terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir.

4.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dan lain lain. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian.

Tabel 4.7 PDRB, Peranan, dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018

URAIAN	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	8 266,92	9 562,51	11 121,62	12 819,83	13 304,2
- ADHK 2010	7 121,75	7 736,23	8 232,03	8 803,74	9 074,7
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,21	0,22	0,24	0,25	0,24
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	8,33	8,63	6,41	6,94	3,08

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Nilai PDRB lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tahun 2018 di Kota Tebing Tinggi mencapai 13,3 milyar rupiah (secara harga konstan 2010) adalah 9,1 milyar rupiah. Sementara itu, menurut harga berlaku, nilainya mencapai 13,3 milyar rupiah atau dengan kata lain berkontribusi sebesar 0,24 persen terhadap perekonomian di Kota Tebing Tinggi. Peran lapangan usaha ini relatif sama sejak lima tahun terakhir. Namun demikian, laju pertumbuhannya pada tahun 2018 tergolong melambat dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari 6,94 persen menjadi 3,08 persen.

4.6 Konstruksi

Lapangan usaha ini termasuk salah satu yang memiliki andil besar terhadap perekonomian di Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2014. Pada tahun 2018, perannya tercatat sebesar 14,76 persen atau setara dengan PDRB ADHB senilai 813,5 milyar rupiah.

Tabel 4.8 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018

URAIAN	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	547 766,26	608 915,67	670 900,92	740 051,73	813 565,1
- ADHK 2010	440 512,27	469 606,03	500 686,32	535 084,42	564 066,9
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	14,00	14,20	14,20	14,45	14,76
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	6,29	6,60	6,62	6,87	5,42

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Laju pertumbuhan lapangan usaha konstruksi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami akselerasi hingga mecatat nilai pertumbuhan 6,87 persen. Sayangnya, pada tahun 2018 pertumbuhannya melambat menjadi 5,42 persen.

Gambar 4.5 Peranan dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018 (Persen)



4.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor termasuk salah satu lapangan usaha yang memegang andil penting dalam perekonomian di Kota Tebing Tinggi.

Tabel 4.9 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018

U R A I A N	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	783 367,81	887 586,54	1 017 085,14	1 126 275,24	1 253 053,8
- ADHK 2010	627 075,69	672 287,68	728 573,20	789 808,73	858 971,1
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	20,02	20,70	21,52	21,98	22,73
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	8,84	7,21	8,37	8,40	8,76

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sejak tahun 2014, lebih dari seperlima PDRB di Kota Tebing Tinggi dihasilkan dari lapangan usaha ini. Dalam lima tahun belakangan, peran lapangan usaha ini mencapai puncaknya di tahun 2018 yakni berkontribusi sebesar 22,73 persen dari

total keseluruhan PDRB Kota Tebing Tinggi atau setara dengan 1,2 triliun rupiah (atas dasar harga berlaku). Pertumbuhannya juga terus mengalami akselerasi sejak tahun 2015 hingga mencapai nilai pertumbuhan sebesar 8,76 persen pada tahun 2018.

Tabel 4.10 Peranan dan Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018 (Persen)

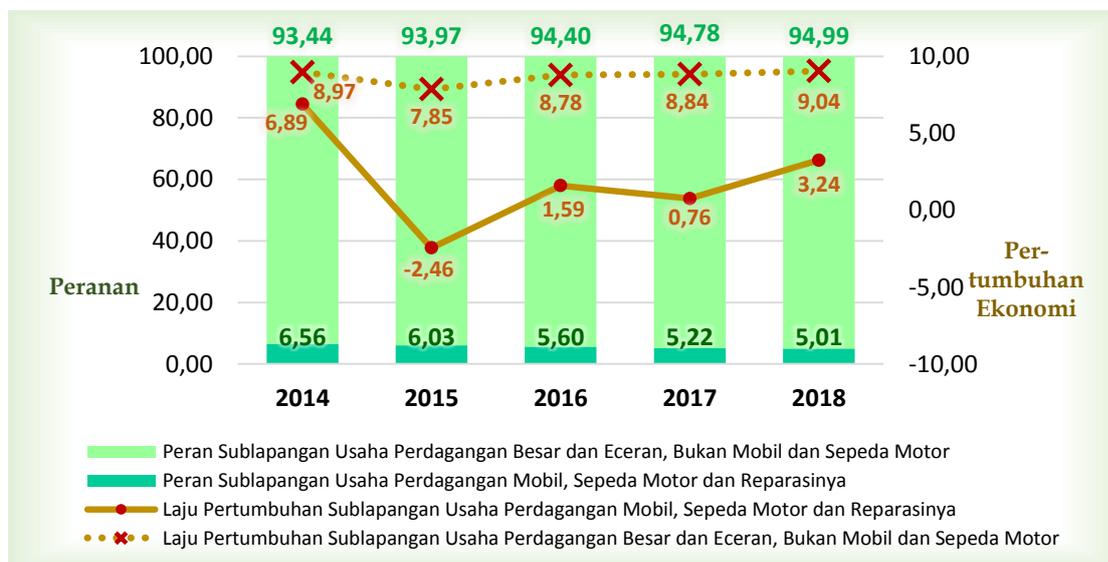
SUBLAPANGAN USAHA		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Peranan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	6,56	6,03	5,60	5,22	5,01
2	Perdagangan Besar dan Eceran	93,44	93,97	94,40	94,78	94,99
Laju Pertumbuhan		8,84	7,21	8,37	8,40	8,76
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	6,89	-2,46	1,59	0,76	3,24
2	Perdagangan Besar dan Eceran	8,97	7,85	8,78	8,84	9,04

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Jika ditinjau berdasarkan sublapangan usahanya, diketahui bahwa lebih dari sembilan puluh persen nilai lapangan usaha ini bersumber dari Perdagangan Besar dan Eceran (sebesar 94,99 persen pada tahun 2018) dan sebagian kecil dari Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya (sebesar 5,01 persen pada tahun yang sama).

Gambar 4.6 Peranan Sublapangan Usaha dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018



Pertumbuhan sublapangan usaha tercepat juga adalah dari Perdagangan Besar dan Eceran (tumbuh hingga lebih dari 9 persen pada tahun 2018). Sementara itu, sublapangan usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya juga tumbuh sebesar 3,24. Nilai pertumbuhan tersebut merupakan yang tercepat sejak tahun 2015.

4.8 Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 sublapangan usaha, yaitu (i) Angkutan Rel; (ii) Angkutan Darat; (iii) Angkutan Laut; (iv) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; (v) Angkutan Udara; serta (vi) Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir. Peranan lapangan usaha ini terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi dari tahun 2014 hingga 2018 cukup stabil yakni di nilai 8 (delapan) persen. Pada 2018, tercatat PDRB ADHK 2010 dan ADHB dari lapangan usaha ini berturut-turut adalah 305,2 milyar rupiah dan 439,9 milyar rupiah.

Sayangnya, pada tahun 2018 lapangan usaha ini mengalami perlambatan pertumbuhan dari yang semula sebesar 7,07 persen pada tahun sebelumnya menjadi 4,95 persen. Nilai pertumbuhan lapangan usaha tersebut merupakan yang paling kecil sejak lima tahun terakhir (dari tahun 2014).

Tabel 4.11 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018

URAIAN	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	306 304,25	338 632,95	378 678,49	413 333,38	439 911,4
- ADHK 2010	242 343,24	258 120,50	271 651,19	290 845,85	305 248,6
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	7,83	7,90	8,01	8,07	7,98
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	6,82	6,51	5,24	7,07	4,95

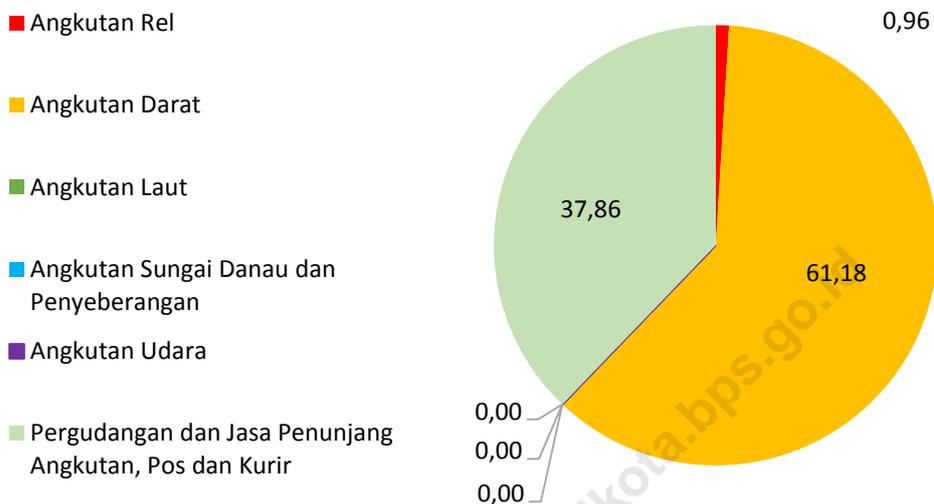
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Adapun jika ditinjau berdasarkan sublapangan usahanya, diketahui bahwa kontribusi terbesar pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan ini adalah berasal dari Angkutan Darat yang memberi sumbangsih peran untuk lebih dari setengah PDRB lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yakni lebih tepatnya sebesar 61,18 pada tahun 2018. Disusul oleh sublapangan usaha

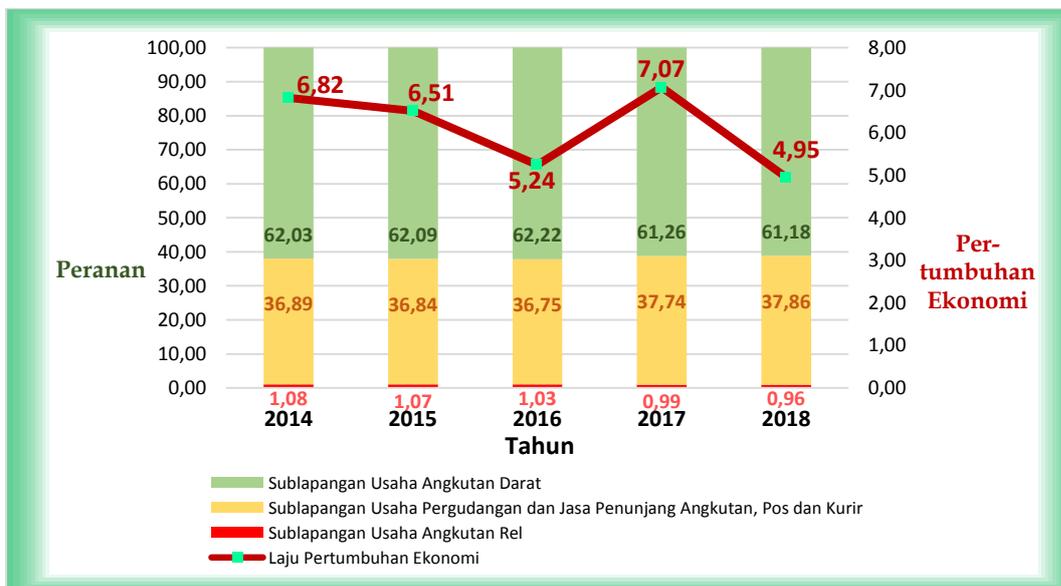
Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir yang berkontribusi sebesar 37,86 persen. Adapun sisanya sebesar 0,96 persen adalah dari Angkutan Rel.

Gambar 4.7 Peranan Sublapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 (Persen)



Sementara itu, tiga sublapangan usaha lainnya yakni Angkutan Laut; Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; serta Angkutan Udara sama sekali tidak mencetak nilai PDRB untuk Kota Tebing Tinggi dikarenakan tiadanya aktivitas tersebut di kota ini hingga tahun 2018. Perkembangan kontribusi per lapangan usaha tersebut sejak 2014 dapat dilihat pada garfik berikut.

Gambar 4.8 Peranan Sublapangan Usaha (Kontribusi Terbesar) dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018 (Persen)



4.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi sebesar 4,13 persen terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018. Nilai tersebut tidak jauh berbeda dengan keadaan sejak 2014, yakni kontribusinya selalu berada pada kisaran 4 (empat) persen. Total nilai PDRB yang dihasilkan dari lapangan usaha ini secara harga berlaku maupun harga konstan (2010) secara berturut-turut adalah 227,8 milyar rupiah dan 169,4 milyar rupiah.

Adapun ditinjau berdasarkan sublapangan usahanya, diketahui bahwa lebih dari sembilan puluh persen nilai lapangan usaha ini bersumber dari sublapangan usaha Penyediaan Makan Minum (sebesar 94,93 persen pada tahun 2018) dan sebagian kecil dari sublapangan usaha Penyediaan Akomodasi (sebesar 5,07 persen pada tahun yang sama).

Tabel 4.12 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018

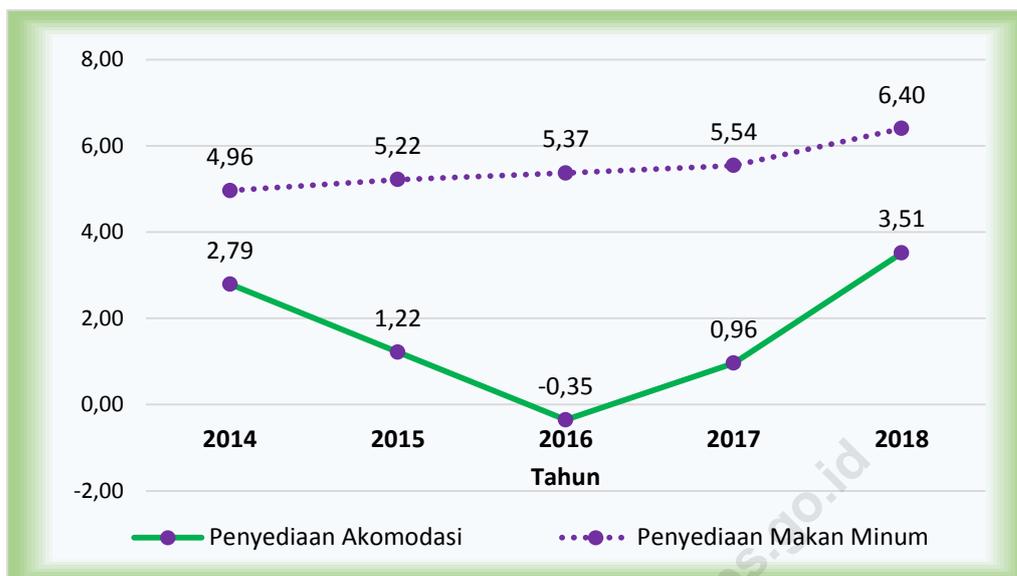
Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	168 446,55	183 103,81	196 465,21	212 391,38	227 831,4
- ADHK 2010	137 411,77	144 229,34	151 464,82	159 454,36	169 400,4
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	4,31	4,27	4,16	4,15	4,13
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,82	4,96	5,02	5,27	6,24
Proporsi terhadap PDRB Penyediaan Akomodasi & Makan Minum (% - ADHB)					
a. Penyediaan Akomodasi	5,89	5,78	5,51	5,22	5,07
b. Penyediaan Makan Minum	94,11	94,22	94,49	94,78	94,93

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara keseluruhan, lapangan usaha ini mencatatkan laju pertumbuhan positif yakni sebesar 6,24 persen pada tahun 2018, mengalami akselerasi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,27 persen. Hal ini disebabkan terjadinya akselerasi pada kedua sublapangan usaha. Nilai pertumbuhan sublapangan usaha Penyediaan Akomodasi naik menjadi 3,51 persen pada tahun 2018 (semula bernilai 0,96 persen pada tahun 2017). Sementara sublapangan usaha Penyediaan Makan Minum juga mengalami percepatan pertumbuhan dari 5,54 persen di tahun 2017 menjadi 6,40 persen di tahun 2018.

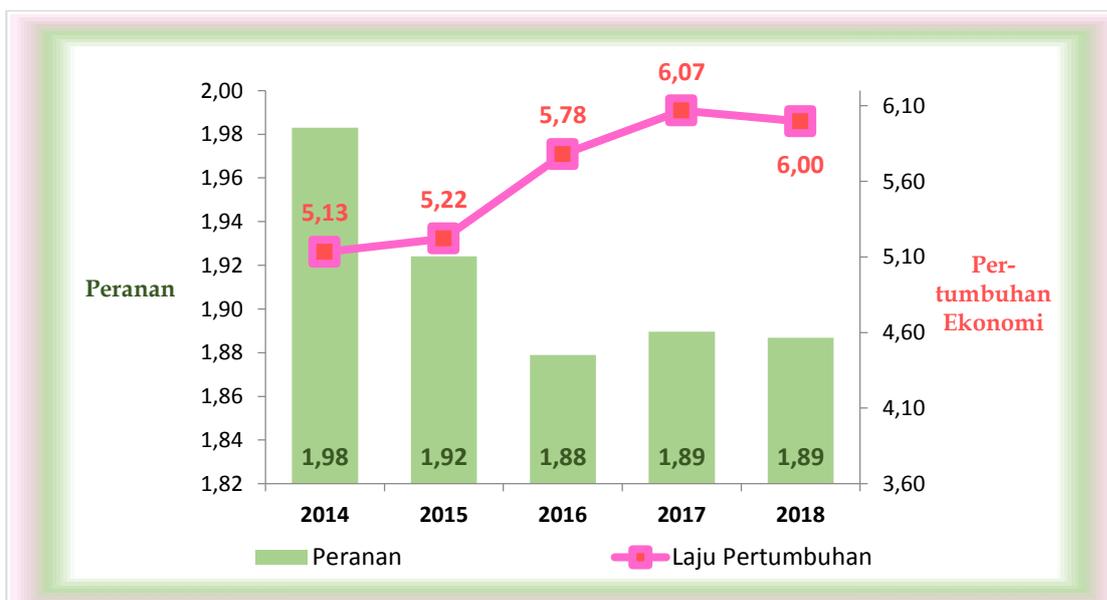
Gambar 4.9 Pertumbuhan Sublapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018 (Persen)



4.10 Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan lapangan usaha ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Adapun di Kota Tebing Tinggi, lapangan usaha ini berkontribusi sebesar hampir dua persen terhadap PDRB tahun 2018 (tepatnya yakni 1,89 %).

Gambar 4.10 Peranan dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018 (Persen)



Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di Kota Tebing Tinggi selama tahun 2014-2018 relatif stabil pada kisaran nilai 1,9 persen. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini cukup tinggi yakni sebesar 6 persen pada tahun 2018, meskipun nilai tersebut tergolong sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,07 persen.

4.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Pertumbuhan nilai tambah pada lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 berakselerasi sangat cepat dari sebesar -0,06 persen di tahun 2017 menjadi 1,98 persen di tahun 2018. Nilai PDRB yang dihasilkan dari lapangan usaha ini sekitar 285,8 milyar rupiah (menurut harga berlaku), atau setara dengan 179,4 milyar rupiah jika dihilangkan faktor inflasinya (harga konstan 2010). Kontribusi lapangan usaha ini cukup signifikan pada PDRB total di Kota Tebing Tinggi selama lima tahun terakhir (sejak 2014) yakni sebesar lebih 5 (lima) persen. Pada 2018, perannya mencapai 5,18 persen.

Tabel 4.13 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018

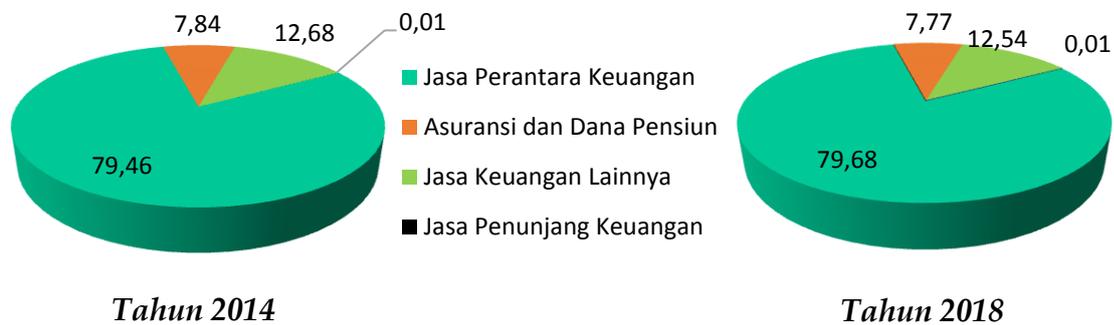
Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	229 283,75	249 166,41	262 847,58	272 242,34	285 760,0
- ADHK 2010	166 506,16	171 869,44	176 079,31	175 968,70	179 444,8
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	5,86	5,81	5,56	5,31	5,18
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	3,89	3,22	2,45	-0,06	1,98

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Jika dirinci lagi, sejak tahun 2014 hingga 2018 yang menjadi penyumbang terbesar pada lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi ini adalah sublapangan usaha Jasa Perantara Keuangan (yang berkontribusi sebesar lebih dari 75 persen), diikuti sublapangan usaha Jasa Keuangan Lainnya (sekitar 12 persen), dan kemudian sublapangan usaha Asuransi dan Dana Pensiun (sekitar 8 persen). Sementara itu, sisanya adalah peran dari sublapangan usaha Jasa Penunjang Keuangan yang nilai kontribusinya tidak begitu signifikan (mendekati 0 persen). Secara rinci, informasi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 4.11 Peranan Sublapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 dan 2018 (Persen)



4.12 Real Estate

Lapangan usaha *Real Estate* memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kota Tebing Tinggi, yakni sekitar 8 persen selama lima tahun terakhir (sejak tahun 2014). Pada tahun 2018, kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi yakni sebesar 8,33 persen, atau setara dengan 307,6 miliar rupiah (atas dasar harga berlaku).

Tabel 4.14 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Real Estat di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	258 573,05	270 079,83	283 131,31	297 079,63	307 567,4
- ADHK 2010	258 573,05	270 079,83	283 131,31	297 079,63	307 567,4
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	8,27	8,31	8,37	8,32	8,33
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,39	4,45	4,83	4,93	3,53

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Namun demikian, laju pertumbuhan lapangan usaha ini cenderung melambat pada tahun 2018 yakni menjadi 3,53 persen atau tercatat sebagai yang terlambat selama lima tahun terakhir dimana sebelumnya sejak tahun 2014 selalu berada di kisaran lebih dari 4 (empat) persen.

4.13 Jasa Perusahaan

Lapangan usaha Jasa Perusahaan termasuk salah satu lapangan usaha yang berkontribusi relatif kecil terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (tidak lebih dari setengah persen) selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, peran lapangan usaha ini terhadap total PDRB adalah 0,46 persen. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, lapangan usaha ini terus mengalami perlambatan pertumbuhan meskipun nilai pertumbuhannya selalu bernilai positif. Pada 2014 lapangan usaha ini tumbuh sebesar 3,86 persen dan pada tahun 2018 pertumbuhannya menjadi 1,54 persen.

Tabel 4.15 Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018

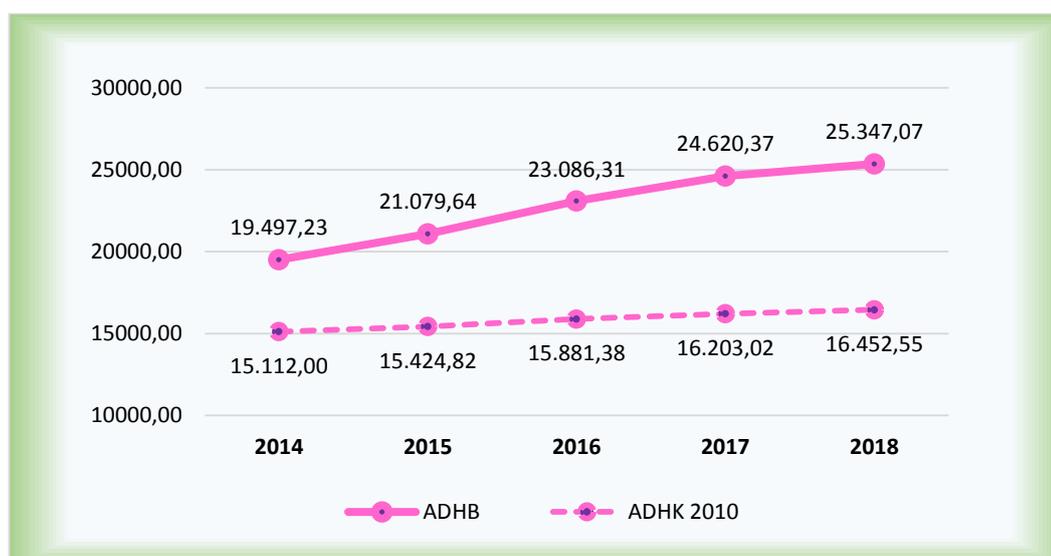
Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,50	0,49	0,49	0,48	0,46
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	3,86	2,07	2,96	2,03	1,54

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara total, lapangan usaha ini menghasilkan nilai tambah sebesar 25,3 milyar rupiah pada tahun 2018 (secara harga berlaku) atau jika dihilangkan faktor inflasinya, setara dengan 16,4 milyar rupiah (atas dasar harga konstan 2010).

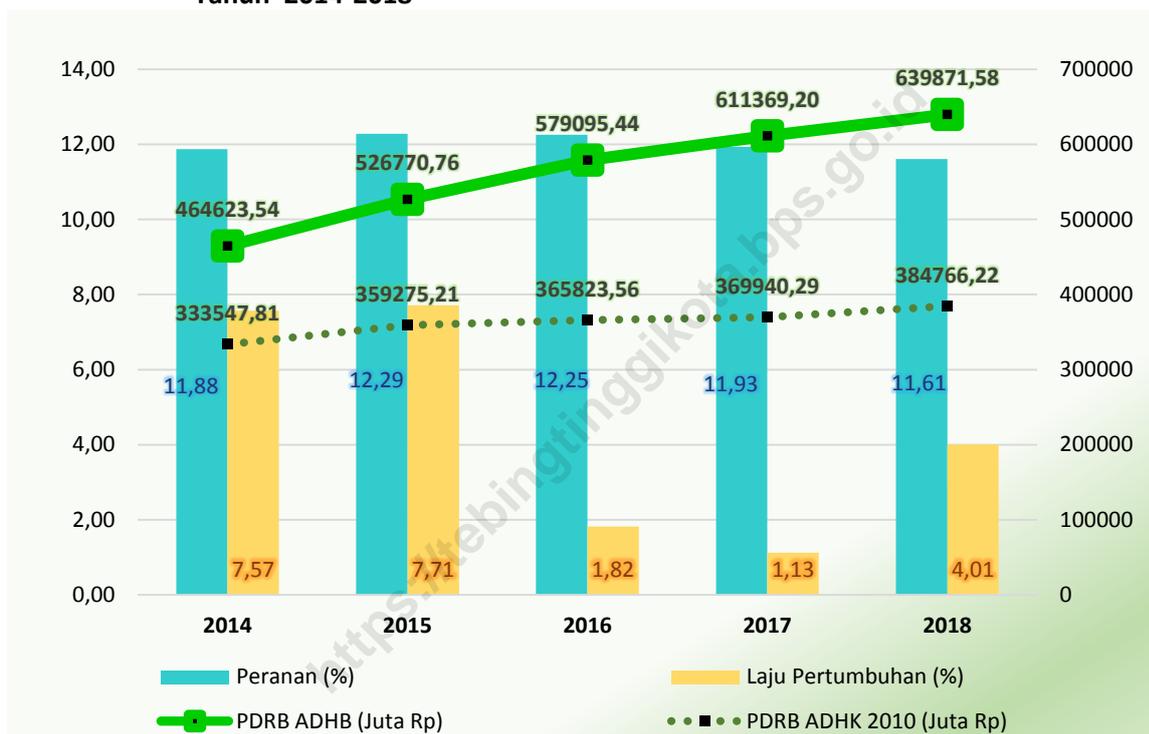
Gambar 4.12 PDRB ADHB dan ADHK 2010 Lapangan Usaha Jasa Perusahaan, di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)



4.14 *Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib*

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan yang berifat pemerintahan, dimana umumnya dilakukan oleh Pemerintah, termasuk juga kegiatan perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya.

Gambar 4.13 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018



Selama tahun 2014-2018, lapangan usaha ini terus memiliki nilai pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2018, nilai pertumbuhannya adalah sebesar 4,01 persen atau berakselerasi cukup besar dibanding tahun 2017 dan tahun 2016 yang masing-masing sebesar 1,13 persen dan 1,82 persen.

Lapangan usaha ini termasuk salah satu penyumbang terbesar bagi PDRB di Kota Tebing Tinggi yakni di kisaran 11-12 persen selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, peran lapangan usaha ini mencapai 11,61 persen. Adapun nilai tambah yang dihasilkan dari lapangan usaha ini mencapai 639,9 milyar rupiah (atas dasar harga berlaku) pada tahun 2018 atau setara dengan 384,8 milyar rupiah jika faktor inflasinya dihilangkan (atas dasar harga konstan 2010).

4.15 Jasa Pendidikan

Selama tahun 2014-2018, lapangan usaha Jasa Pendidikan berkontribusi sekitar 6 (enam) persen terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi. Pada tahun 2018, nilai tambah yang dihasilkan dari lapangan usaha ini mencapai 343,9 milyar rupiah atau sebesar 6,24 persen dari total PDRB.

Tabel 4.16 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan, di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
- ADHB	271 071,58	285 627,66	308 301,01	320 694,02	343 906,0
- ADHK 2010	195 544,59	203 581,47	211 316,49	219 534,58	230 484,5
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	6,93	6,66	6,52	6,26	6,24
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,37	4,11	3,80	3,89	4,99

* Angka sementara

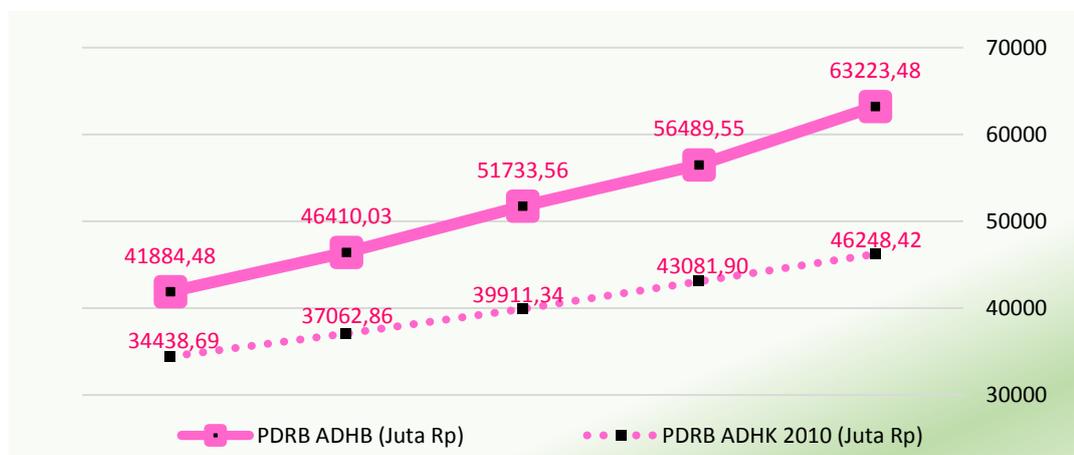
** Angka sangat sementara

Lapangan usaha ini tumbuh dengan nilai positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, nilai pertumbuhannya mencapai 4,99 persen. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 2014.

4.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya.

Gambar 4.14 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018



Nilai PDRB lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terus meningkat sejak tahun 2014 hingga pada tahun 2018 dari semula senilai 41,9 milyar rupiah menjadi 63,2 milyar rupiah (atas dasar harga berlaku). Sementara jika nilai inflasinya dihilangkan (atas dasar harga konstan 2010), nilai tersebut setara dengan peningkatan dari 34,4 milyar rupiah di tahun 2014 menjadi 46,2 milyar rupiah di tahun 2018.

Tabel 4.17 Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	1,07	1,08	1,09	1,10	1,15
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	7,50	7,62	7,69	7,94	7,35

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Kontribusi lapangan usaha ini terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi stabil di sekitaran 1 persen selama lima tahun terakhir, sementara nilai pertumbuhannya cukup tinggi yakni di sekitaran 7 persen.

4.17 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kontribusi lapangan usaha Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi relatif kecil, yakni hanya sekitar 1 persen. Pada tahun 2018, peranannya sebesar 0,92 persen atau setara dengan nilai PDRB sebanyak 50,9 milyar rupiah.

Tabel 4.18 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Lainnya di Kota Tebing Tinggi Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
- ADHB	39 870,08	43 097,42	46 331,68	48 390,63	50 912,8
- ADHK 2010	33 942,71	35 071,18	36 186,30	37 489,59	38 692,6
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	1,02	1,01	0,98	0,94	0,92
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,62	3,32	3,18	3,60	3,21

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Adapun lapangan usaha ini selalu memiliki laju pertumbuhan bernilai positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, nilai pertumbuhannya adalah sebesar 3,21 persen, yang mana sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya (sebesar 3,60 persen).



5

LAMPIRAN

Tabel 1. PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018
(Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA		2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	55.132,57	57.944,67	62.091,89	65.279,60	70.561,56
B	Pertambangan dan Penggalian	6.470,47	6.967,35	7.400,36	7.565,16	7.839,87
C	Industri Pengolahan	563.506,23	578.083,51	619.874,53	681.509,58	706.291,84
D	Pengadaan Listrik, Gas	5.684,71	5.972,47	6.328,96	7.164,55	7.721,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.266,9	9.562,5	11.121,62	12.819,83	13.304,19
F	Konstruksi	547.766,3	608.915,7	670.900,92	740.051,73	813.565,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	783.367,81	887.586,54	1.017.085,14	1.126.275,24	1.253.053,75
H	Transportasi dan Pergudangan	306.304,25	338.632,95	378.678,49	413.333,38	439.911,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	168.446,55	183.103,81	196.465,21	212.391,38	227.831,35
J	Informasi dan Komunikasi	77.581,72	82.503,87	88.790,46	96.805,98	104.010,55
K	Jasa Keuangan	229.283,75	249.166,41	262.847,58	272.242,34	285.759,97
L	Real Estate	323.417,06	356.438,87	395.345,34	426.013,33	459.404,95
M,N	Jasa Perusahaan	19.497,23	21.079,64	23.086,31	24.620,37	25.347,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	464.623,54	526.770,76	579.095,44	611.369,20	639.871,58
P	Jasa Pendidikan	271.071,58	285.627,66	308.301,01	320.694,02	343.906,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	41.884,48	46.410,03	51.733,56	56.489,55	63.223,48
R,S,T,U	Jasa lainnya	39.870,08	43.097,42	46.331,68	48.390,63	50.912,84
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3.912.175,21	4.287.864,13	4.725.478,51	5.123.015,86	5.512.517,21

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2. PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA		2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	44.810,89	47.179,37	49.330,91	51.592,24	53.704,25
B	Pertambangan dan Penggalian	5.307,65	5.525,27	5.768,64	6.060,89	6.266,98
C	Industri Pengolahan	457.564,40	449.309,78	462.783,95	475.043,60	484.844,62
D	Pengadaan Listrik, Gas	5.918,03	6.404,88	6.622,42	6.910,49	7.114,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/	7.121,75	7.736,23	8.232,03	8.803,74	9.074,75
F	Konstruksi	440.512,27	469.606,03	500.686,32	535.084,42	564.066,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	627.075,69	672.287,68	728.573,20	789.808,73	858.971,11
H	Transportasi dan Pergudangan	242.343,24	258.120,50	271.651,19	290.845,85	305.248,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	137.411,77	144.229,34	151.464,82	159.454,36	169.400,38
J	Informasi dan Komunikasi	78.441,37	82.536,01	87.306,00	92.603,17	98.155,94
K	Jasa Keuangan	166.506,16	171.869,44	176.079,31	175.968,70	179.444,85
L	Real Estate	258.573,05	270.079,83	283.131,31	297.079,63	307.567,42
M,N	Jasa Perusahaan	15.112,00	15.424,82	15.881,38	16.203,02	16.452,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	333.547,81	359.275,21	365.823,56	369.940,29	384.766,22
P	Jasa Pendidikan	195.544,59	203.581,47	211.316,49	219.534,58	230.484,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34.438,69	37.062,86	39.911,34	43.081,90	46.248,42
R,S,T,U	Jasa lainnya	33.942,71	35.071,18	36.186,30	37.489,59	38.692,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3.084.172,07	3.235.299,89	3.400.749,17	3.575.505,22	3.760.504,52

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 3. Distribusi PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (Persen)

LAPANGAN USAHA		2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,41	1,35	1,31	1,27	1,28
B	Pertambangan dan Penggalian	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14
C	Industri Pengolahan	14,40	13,48	13,12	13,30	12,81
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,15	0,14	0,13	0,14	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,21	0,22	0,24	0,25	0,24
F	Konstruksi	14,00	14,20	14,20	14,45	14,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,02	20,70	21,52	21,98	22,73
H	Transportasi dan Pergudangan	7,83	7,90	8,01	8,07	7,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,31	4,27	4,16	4,15	4,13
J	Informasi dan Komunikasi	1,98	1,92	1,88	1,89	1,89
K	Jasa Keuangan	5,86	5,81	5,56	5,31	5,18
L	Real Estate	8,27	8,31	8,37	8,32	8,33
M,N	Jasa Perusahaan	0,50	0,49	0,49	0,48	0,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,88	12,29	12,25	11,93	11,61
P	Jasa Pendidikan	6,93	6,66	6,52	6,26	6,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,08	1,09	1,10	1,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,02	1,01	0,98	0,94	0,92
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 4. Distribusi PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (Persen)

LAPANGAN USAHA		2014	2015	2016*	2017*	2018**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,45	1,46	1,45	1,44	1,43
B	Pertambangan dan Penggalian	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
C	Industri Pengolahan	14,84	13,89	13,61	13,29	12,89
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,19	0,20	0,19	0,19	0,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,24	0,24	0,25	0,24
F	Konstruksi	14,28	14,52	14,72	14,97	15,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,33	20,78	21,42	22,09	22,84
H	Transportasi dan Pergudangan	7,86	7,98	7,99	8,13	8,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,46	4,46	4,45	4,46	4,50
J	Informasi dan Komunikasi	2,54	2,55	2,57	2,59	2,61
K	Jasa Keuangan	5,40	5,31	5,18	4,92	4,77
L	Real Estate	8,38	8,35	8,33	8,31	8,18
M,N	Jasa Perusahaan	0,49	0,48	0,47	0,45	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,81	11,10	10,76	10,35	10,23
P	Jasa Pendidikan	6,34	6,29	6,21	6,14	6,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,12	1,15	1,17	1,20	1,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,10	1,08	1,06	1,05	1,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (Persen)

LAPANGAN USAHA		2014	2015	2016*	2017*	2018**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,95	5,10	7,16	5,13	8,09
B	Pertambangan dan Penggalian	6,17	7,68	6,21	2,23	3,63
C	Industri Pengolahan	2,54	2,59	7,23	9,94	3,64
D	Pengadaan Listrik, Gas	3,85	5,06	5,97	13,20	7,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,72	15,67	16,30	15,27	3,78
F	Konstruksi	12,69	11,16	10,18	10,31	9,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,35	13,30	14,59	10,74	11,26
H	Transportasi dan Pergudangan	14,26	10,55	11,83	9,15	6,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,48	8,70	7,30	8,11	7,27
J	Informasi dan Komunikasi	4,71	6,34	7,62	9,03	7,44
K	Jasa Keuangan	10,09	8,67	5,49	3,57	4,97
L	Real Estate	8,22	10,21	10,92	7,76	7,84
M,N	Jasa Perusahaan	13,81	8,12	9,52	6,64	2,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,72	13,38	9,93	5,57	4,66
P	Jasa Pendidikan	11,46	5,37	7,94	4,02	7,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,70	10,80	11,47	9,19	11,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,47	8,09	7,50	4,44	5,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		11,33	9,60	10,21	8,41	7,60

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (Persen)

LAPANGAN USAHA		2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,17	5,29	4,56	4,58	4,09
B	Pertambangan dan Penggalian	4,46	4,10	4,40	5,07	3,40
C	Industri Pengolahan	0,40	-1,80	3,00	2,65	2,06
D	Pengadaan Listrik, Gas	8,77	8,23	3,40	4,35	2,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,33	8,63	6,41	6,94	3,08
F	Konstruksi	6,29	6,60	6,62	6,87	5,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,84	7,21	8,37	8,40	8,76
H	Transportasi dan Pergudangan	6,82	6,51	5,24	7,07	4,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,82	4,96	5,02	5,27	6,24
J	Informasi dan Komunikasi	5,13	5,22	5,78	6,07	6,00
K	Jasa Keuangan	3,89	3,22	2,45	-0,06	1,98
L	Real Estate	4,39	4,45	4,83	4,93	3,53
M,N	Jasa Perusahaan	3,86	2,07	2,96	2,03	1,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,57	7,71	1,82	1,13	4,01
P	Jasa Pendidikan	4,37	4,11	3,80	3,89	4,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,50	7,62	7,69	7,94	7,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,62	3,32	3,18	3,60	3,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,45	4,90	5,11	5,14	5,17

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 7. Indeks Perkembangan PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (2010 = 100)

LAPANGAN USAHA		2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	135,1	142,0	152,1	159,9	172,9
B	Pertambangan dan Penggalian	147,5	158,9	168,7	172,5	178,8
C	Industri Pengolahan	133,4	136,9	146,8	161,4	167,3
D	Pengadaan Listrik, Gas	118,3	124,3	131,7	149,1	160,7
E	Pengadaan Air	160,1	185,2	215,3	248,2	257,6
F	Konstruksi	160,7	178,6	196,8	217,1	238,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	168,7	191,1	219,0	242,5	269,8
H	Transportasi dan Pergudangan	169,5	187,4	209,6	228,8	243,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	150,0	163,0	174,9	189,1	202,9
J	Informasi dan Komunikasi	127,3	135,4	145,7	158,9	170,7
K	Jasa Keuangan	175,8	191,1	201,6	208,8	219,2
L	Real Estate	150,2	165,6	183,7	197,9	213,4
M,N	Jasa Perusahaan	164,2	177,6	194,5	207,4	213,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	182,7	207,2	227,7	240,4	251,6
P	Jasa Pendidikan	175,5	185,0	199,6	207,7	222,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	158,6	175,8	195,9	213,9	239,4
R,S,T,U	Jasa lainnya	144,3	155,9	167,7	175,1	184,2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		159,2	174,5	192,3	208,5	224,4

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 8. Indeks Perkembangan PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (2010=100)

LAPANGAN USAHA		2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	109,8	115,6	120,9	126,4	131,6
B	Pertambangan dan Penggalian	121,0	126,0	131,5	138,2	142,9
C	Industri Pengolahan	108,4	106,4	109,6	112,5	114,8
D	Pengadaan Listrik, Gas	123,1	133,3	137,8	143,8	148,0
E	Pengadaan Air	137,9	149,8	159,4	170,5	175,7
F	Konstruksi	129,2	137,7	146,9	156,9	165,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	135,0	144,8	156,9	170,1	185,0
H	Transportasi dan Pergudangan	134,1	142,9	150,4	161,0	169,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	122,4	128,4	134,9	142,0	150,8
J	Informasi dan Komunikasi	128,7	135,5	143,3	152,0	161,1
K	Jasa Keuangan	127,7	131,8	135,0	135,0	137,6
L	Real Estate	120,1	125,5	131,5	138,0	142,9
M,N	Jasa Perusahaan	127,3	129,9	133,8	136,5	138,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	131,2	141,3	143,9	145,5	151,3
P	Jasa Pendidikan	126,6	131,8	136,8	142,2	149,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130,4	140,4	151,1	163,1	175,1
R,S,T,U	Jasa lainnya	122,8	126,9	130,9	135,7	140,0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		125,5	131,7	138,4	145,5	153,1

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 9. Indeks Implisit PDRB Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (2010 = 100)

LAPANGAN USAHA		2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	123,03	122,82	125,87	126,53	131,39
B	Pertambangan dan Penggalian	121,91	126,10	128,29	124,82	125,10
C	Industri Pengolahan	123,15	128,66	133,94	143,46	145,67
D	Pengadaan Listrik, Gas	96,06	93,25	95,57	103,68	108,54
E	Pengadaan Air	116,08	123,61	135,10	145,62	146,61
F	Konstruksi	124,35	129,67	134,00	138,31	144,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	124,92	132,02	139,60	142,60	145,88
H	Transportasi dan Pergudangan	126,39	131,19	139,40	142,11	144,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	122,59	126,95	129,71	133,20	134,49
J	Informasi dan Komunikasi	98,90	99,96	101,70	104,54	105,96
K	Jasa Keuangan	137,70	144,97	149,28	154,71	159,25
L	Real Estate	125,08	131,98	139,63	143,40	149,37
M,N	Jasa Perusahaan	129,02	136,66	145,37	151,95	154,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	139,30	146,62	158,30	165,26	166,30
P	Jasa Pendidikan	138,62	140,30	145,90	146,08	149,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121,62	125,22	129,62	131,12	136,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	117,46	122,89	128,04	129,08	131,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		126,85	132,53	138,95	143,28	146,59

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (Persen)

LAPANGAN USAHA		2014	2015	2016*	2017*	2018**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,74	-0,18	2,48	0,53	3,84
B	Pertambangan dan Penggalian	1,64	3,44	1,73	-2,70	0,22
C	Industri Pengolahan	2,13	4,47	4,11	7,11	1,54
D	Pengadaan Listrik, Gas	-4,52	-2,92	2,49	8,48	4,69
E	Pengadaan Air	4,97	6,48	9,30	7,78	0,68
F	Konstruksi	6,03	4,28	3,34	3,22	4,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,90	5,68	5,74	2,15	2,30
H	Transportasi dan Pergudangan	6,97	3,80	6,26	1,95	1,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,40	3,56	2,17	2,69	0,97
J	Informasi dan Komunikasi	-0,41	1,07	1,74	2,79	1,36
K	Jasa Keuangan	5,97	5,28	2,97	3,64	2,93
L	Real Estate	3,67	5,51	5,80	2,70	4,16
M,N	Jasa Perusahaan	9,57	5,92	6,37	4,53	1,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,51	5,26	7,97	4,40	0,63
P	Jasa Pendidikan	6,79	1,21	3,99	0,13	2,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,83	2,96	3,51	1,16	4,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,64	4,62	4,19	0,81	1,94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,58	4,48	4,84	3,11	2,31

* Angka sementara

** Angka sangat sementara



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TEBING TINGGI**

Jl. Gunung Tambura, Tebing Tinggi - 20614

Telp/Fax. : (0621) 21733

Homepage : <http://tebingtinggikota.bps.go.id> E-mail : bps1274@bps.go.id

ISSN 2655-1233



9 772655 123007